



Terkait Temuan BPK atas Belanja Hibah Barang

Bupati Diminta Jatuhkan Sanksi untuk Tujuh OPD

Bangli (Bali Post) -

Lima fraksi di DPRD Bangli, Selasa (11/7) kemarin, menyampaikan pemandangan umumnya terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016. Dalam pemandangan umum yang disampaikan I Dewa Anom Suta, Fraksi Demokrat menyoroti temuan BPK terkait pertanggungjawaban belanja hibah barang yang akan diserahkan untuk masyarakat tahun 2016 di tujuh SKPD yang tidak sesuai ketentuan. Terhadap hal itu, Fraksi Demokrat meminta Bupati memberikan sanksi kepada penerima bantuan hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, termasuk sanksi kepada tujuh OPD yang mengelola bantuan tersebut.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli Nyoman Basma, Fraksi Demokrat menyatakan pemberian sanksi terhadap tujuh OPD tersebut dimaksudkan agar ke depannya masing-masing OPD bisa meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD. "Apa langkah-langkah yang akan diambil pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan tersebut," kata Anom Suta.

Selain menyoroti persoalan itu, Demokrat juga menyoroti masalah kelebihan pembayaran pajak gaji dan tunjangan PNS Kabupaten Bangli. Demokrat berharap Pemkab Bangli lebih cermat, berhati-hati serta memperhatikan SOP sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan pendapatan retribusi parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diterima oleh petugas pungut yang lambat disetor ke Bendahara Umum sehingga terjadi keterlambatan penyetoran pendapatan ke kas daerah, Fraksi Demokrat mempertanyakan langkah Bupati dalam menyikapi kinerja Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. "Secara umum kami belum puas terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 yang mana dari segi perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi atau pelaksanaan serta pengawasan tidak sinkron dan belum maksimal," kata Anom Suta.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui pembicara I Wayan Jamin meminta Bupati menjelaskan penyebab tidak tercapainya target

Edisi : Rabu, 12 Juli 2017

Hal : 8



Sambungan ---



Bali Post/ina

SIDANG PARIPURNA - Wakil Ketua DPRD Bangli Nyoman Basma dan Komang Carles serta Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Gede Suryawan saat sidang paripurna DPRD Bangli, Selasa (11/7) kemarin.

realisasi dari pelaksanaan APBD tahun 2016 yang telah direncanakan secara matang oleh perangkat daerah. Sedangkan Fraksi PKPI meminta Bupati untuk menjelaskan alasan tidak tercapainya target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp 1,144 triliun.

Lain halnya dengan pandangan umum yang disampaikan tiga fraksi tersebut,

Fraksi PDI-P melalui pembicaranya, I Wayan Wiryana, menyampaikan rasa prihatinnya atas Silpa tahun 2016 yang mencapai Rp 37,408 miliar yang sangat jauh dari defisit anggaran tahun 2017. Salah satu penyebabnya adalah kas tahun anggaran 2016 dipergunakan untuk menutupi DAK yang tidak ditransfer di tahun 2016. Agar di tahun berikutnya hal itu tidak terulang,

Fraksi PDI-P menyarankan Bupati meningkatkan kinerja perangkat daerah sehingga target realisasi anggaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sementara itu, Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya yang disampaikan I Nyoman Budiada hanya menyarankan Bupati untuk mempertahankan opini WTP dari BPK. (kmb40)

Edisi : Rabu, 12 Juli 2017

Hal : 8



Dilanjutkan, Penataan Tukad Mati Kuta

Mangupura (Bali Post) -

Penataan muara Tukad Mati, Patasari, yang sebelumnya bertujuan mengatasi banjir di wilayah Kuta, Badung, kini kembali dilanjutkan. Keberlanjutan penataan Tukad Mati sepanjang 14,2 km dari hulu ke hilir ini rencananya dilaksanakan akhir 2017 atau awal tahun depan.

Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Bali-Penida Putu Edi Purnawijaya mengungkapkan, saat ini masih proses pengumpulan anggaran dan penyusunan kontrak. "Bisa dibilang prakualifikasi. Sekarang sudah bulan Juli dan mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun bisa mulai dikerjakan," ungkapnya saat dihubungi Senin (10/7) lalu.

Dikatakannya, total dana yang dipersiapkan Rp 450 miliar. Dalam pengerjaannya nanti, bukan hanya membuat tanggul dan membendung air, tetapi juga mengeruk sedimentasi serta membuat jalan inspeksi di kanan dan kiri Tukad Mati. Penataan dari hulu ke hilir ini kemungkinan dibagi menjadi dua segmen, yaitu lanjutan dari *long storage* Patasari menuju ke hulu sepanjang 13 km dan ke hilir *long storage* sepanjang 1,2 km.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Balai Wilayah Sungai Bali-Penida I Ketut Jayada menyatakan saat ini sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan memberikan izin untuk penataan lanjutan tersebut dan diupayakan melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait jalan inspeksi di sana. Yang jelas jalan inspeksi nanti bisa dilewati mobil atau motor untuk pengangkutan sampah dan pemeliharaan. "Yang di hilir disesuaikan dengan *long storage* yang dibangun Pemkab Badung dan yang ke hulu disesuaikan dengan keperluan," terangnya.

Penataan akan dilaksanakan secara bertahap dari hilir sampai hulu. Saat ini fokus penataan hanya untuk menata kawasan dari masalah banjir. Sementara penataan Tukad Mati berikutnya untuk menambah debit air di estuary dam. "Arahnya dan desainnya ke situ, tapi bukan sekarang," tambahnya. (kmb23)

Edisi : Rabu, 12 Juli 2017

Hal : 5



Kasus Kicen dan Kedua Anaknya

Dilimpahkan ke Kejari

Semarapura (Bali Post) -

Penyidik Unit Tipikor Sareskrim Polres Klungkung akhirnya melimpahkan kasus dugaan korupsi hibah bansos dengan tersangka I Wayan Kicen Adnyana dan kedua anaknya, Ketut Krisnia Adiputra dan Ni Kadek Endang Astiti, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, Selasa (11/7) kemarin. Setelah dilimpahkan, ketiga tersangka itu dititip di Rutan Klungkung guna menunggu proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan pantauan, Kicen yang tercatat sebagai anggota DPRD Klungkung bersama kedua anaknya tiba di kejaksaan sekitar pukul 11.30 Wita. Setelah menjalani proses secara tertutup sekitar dua jam, mereka langsung digiring ke Rutan Klungkung.

Sebelum masuk ke mobil, Kicen, Krisnia Adiputra, dan Endang Astiti yang mengenakan kaos cokelat berbalut jaket hitam nampak sedih. Sesekali ia juga mengusap air mata dengan tangannya.

Raut lesu juga terpancar dari wajah Kicen sebelum masuk ke mobil Toyota Rush milik seorang jaksa. Pemandangan itu langsung disaksikan istri Krisnia Adiputra, Putu Hemawati. Raut sedih pun tak dapat dipisahkan dari wajahnya.

Kasi Pidsus Kejari Klungkung Meyer V Simanjuntak menegaskan, penggunaan mobil pribadi itu bukan berarti memberikan keistimewaan terhadap tersangka. Namun, karena kendaraan operasional kejaksaan dipakai dalam kegiatan di Kejati. "Kendaraan

Kejaksanaan dipakai di kegiatan Kejati. Biar tidak salah pemberitaan," tegasnya.

Khusus untuk alasan penahanan, pria berkulit putih ini mengatakan karena tersangka sudah memenuhi persyaratan, di samping untuk mempermudah jalannya persidangan. Seiring dengan penahanan ini, berkas dakwaan juga sudah disiapkan jaksa. "Untuk berkas perkara paling lambat Jumat ini sudah kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor. Semoga surat dakwaan segera di acc oleh tim jaksa," ungkapnya.

Sementara itu, kuasa hukum ketiga tersangka, Bernadin mengaku sudah mengajukan permohonan pengalihan penahanan kepada jaksa. Persetujuannya tergantung pimpinan Kejari. (kmb45)



DIGIRING - Tersangka I Wayan Kicen Adnyana dan kedua anaknya, Ketut Krisnia Adiputra dan Ni Kadek Endang Astiti, saat digiring ke Rutan Klungkung, Selasa (11/7) kemarin.

Edisi : Rabu, 12 Juli 2017

Hal : 10